

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abadinsky, Howard. *Organized Crime, Ninth Edition*. Belmont: Wadsworth, Cengage Learning, 2007.
- Abdullah, M. Zen. *Pidana Penjara Eksistensi dan Efektivitasnya dalam Upaya Resosialisasi Narapidana*. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, 2009.
- Adami, Yuni Aditya. "Pemberian Remisi terhadap Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012". *JOM Fakultas Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2016.
- Ali, Achmad. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Kolom Bidang Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ali, Mahrus Ali. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Arinanto, Satya Arinanto. *Memahami Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. "Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Keadilan*, Vol.5 No.1 Tahun 2011.
- Atmasasmita, Romli. *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Alumni, 1975.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Europe, Council. *The Protection of Witnesses and Collaborators of Justice: Recommendation R(2005)9 adopted by the Committee of the Ministers of Council of Europe on 20 April 2005 and Explanatory Memorandum*. Strasbourg: Council of Europe, 2005.

- Fyfe, Nicholas Fyfe dan James Sheptycki. *Facilitating Witness Co-operation in Organised Crime Cases: An International Review*. London: Crown Research Development and Statistics Directorate Home Office, 2005.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- _____, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- _____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- _____, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2023
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.
- _____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Handoyono, Eko dan Hartati Sulistyono Rini, eds. *Proseding Seminar Nasional: Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Semarang: Penerbit Widyakara Semarang dan DPP IKA Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, ed. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harjowidigdo, Rooseno. *Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pemberian Remisi*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995.
- Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda (Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht)*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Kanter, E.Y dan S. R Sianturi. *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2002.

ARTIKEL ILMIAH/ KARYA ILMIAH LAINNYA

Amanda, Jalu dan Karya dan Ramadina Savitri. “Pencabutan Hak Remisi sebagai Pidana Tambahan bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Penelitian Hukum*, Volumen 2, Nomor 1, Maret 2015.

Junaedi, I Ketut Patra. “Korupsi: Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 3 (1), 2018.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Pendidikan Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011.

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Koeswadi. *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

MD, Moh. Mahfud. *et al. Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Menteri Hukum dan HAM. “Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008”.

Afrianto, 2024

MODEL IDEAL KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA 96

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Minarno, Nur Basuki. *Beberapa Hasil Seminar Problematika Pemberian Remisi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Monteiro, Josef M. “Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42, Nomor 2 April – Juni 2012.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nahdatul Ulama, Fatwa Ulama Nahdlatul Ulama (NU) pada Munas Alim Ulama dari kalangan NU di Asrama Haji Pondok Gede, Agustus 2002.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Prakoso, Djoko Prakoso. *Hukum Penintesis di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Purnomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Prayudi, Guse. “Pidana Pembayaran Uang Pengganti”. *Varia Peradilan*, Nomor 259, Juni 2007.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Cet. I. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua*. cet. I, 2007. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007.
- Rohomana, Basir. “Pidana Pembayaran Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6. No. 1, Tahun 2017.

Afrianto, 2024

MODEL IDEAL KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA 97

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- Sahetapy, J.E. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni, 1979.
- Saleh, Roeslan. *Stelesel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Santoso, Mas Achmad. “Perlindungan Terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)”. Mmakalah disampaikan pada International Workshopen The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011.
- Soedarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rhineka Cipta, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta Rajawali Press, 1990.
- Sugandi, R. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tucunan, Julia. “Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie, ed., *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Zuccarelli, Fausto, “Handling and Protecting Witnesses and Collaborators of Justice: The European Experience”. Makalah disampaikan pada UNDP-

POGAR Rjregional Workshop on Witness and Whistleblower Protection, Rabat, Maroko, 3 April 2009).

PERATURAN PERATURAN/ PERUNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1982, TLN No. 3209.

Indonesia. *Undang-Undang Pemasarakatan*, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77, TLN No. 3614.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN. 140, TLN No. 387.

Indonesia. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134, TLN No. 4150.

Indonesia. *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137, TLN No. 4250.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah*, PP. No. 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah*, PP. No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah*, PP. No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Indonesia, *Keputusan Presiden*, Kepres No. 156 Tahun 1950 tentang Pembebasan Hukuman untuk Seluruhnya atau Sebagian pada Tiap-Tiap Tanggal 17 Agustus.

Indonesia, *Keputusan Presiden*, Kepres No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Menjalani Masa Pidana (Remisi).

Afrianto, 2024

MODEL IDEAL KEBIJAKAN PEMBERIAN REMISI PADA NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA: STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA 99

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Indonesia, *Keputusan Presiden*, Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Remisi.

Indonesia, *Keputusan Presiden*, Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM*, Permen No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.